

# Jalan Terjal Menuju Rekonsiliasi

**T**ampaknya, rekonsiliasi masih menjadi barang mewah di negeri ini. Setidaknya, ada beberapa faktor penghambat terciptanya rekonsiliasi. *Pertama*, masyarakat Indonesia masih trauma dengan tragedi kemanusiaan 1965. *Kedua*, suasana dendam masih menyelimuti sebagian besar bangsa ini. *Ketiga*, secara politis, rekonsiliasi tidak menguntungkan karena dicurigai dapat berpotensi membangkitkan kembali partai komunis di Indonesia. *Keempat*, secara hukum, rekonsiliasi ditakuti karena berpeluang menyeret para pelaku tindak kejahatan, terutama dalam hal ini, adalah pihak militer dan rezim Orde Baru. *Kelima*, kuatnya pertentangan ideologi antara Islam dan komunisme.

Rekonsiliasi berarti mengungkap berbagai kebenaran-kebenaran dengan jalan pengakuan dari seseorang/kelompok terhadap tragedi yang telah terjadi pada masa lalu, dengan cara memaafkannya sekaligus belajar dari masa lampau untuk tidak mengulangi kembali tragedi itu. Tanpa rekonsiliasi, mustahil kita dapat mewujudkan tata kehidupan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sayangnya lagi, hingga hari ini, kita juga belum menemukan atau memiliki satu rumusan teologis, terutama bagi umat Islam, sebagai landasan untuk melakukan rekonsiliasi. Untuk lebih mengetahui perihal prospek dan tantangan rekonsiliasi ini, Musoffa Basyir Rasyad dari Jurnal *TASHWIRUL AFKAR* berhasil mewawancarai Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam. Sementara itu, di tempat terpisah, Marzuki Wahid juga berhasil mewawancarai KH. Husein Muhammad, yang biasa dipanggil Kang Husein, dari Pondok Pesantren Dar el-Tauhid Arjawinangun Cirebon dan Ketua Yayasan FAHMINA-Institute Cirebon, seputar tema ajaran-ajaran dan akar sejarah peradaban Islam sebagai landasan teologis bagi rekonsiliasi bangsa. Berikut petikannya.



## Kelompok Anti-Rekonsiliasi Masih Banyak

**Asvi Warman Adam**  
(Sejarawan LIPI)

**P**eristiwa 1965-1966 merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat buruk dan tiada taranya dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia.

Penjelasan seputar peristiwa ini pun sangat beragam dan penuh nuansa politis. Sebagai ahli sejarah, bagaimana Anda melihat tragedi '65 tersebut?

Pertama-tama, saya ingin sedikit menanggapi tentang "dunia" yang tadi dikatakan. Dalam kasus Indonesia, peristiwa '65 memang termasuk tragedi kemanusiaan yang paling besar, tetapi untuk dunia, peristiwa tersebut tidak dianggap besar karena (tragedi, *red.*) yang sering disebut adalah kasus pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman atau kasus pembantaian Khmer Merah di Kamboja. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut sampai terjadi? Hal ini karena konteks peristiwa '65 berbeda dengan kasus Yahudi di Jerman atau kasus Khmer Merah di Kamboja, yaitu konteks perang dingin. Perang dingin artinya perang antara Amerika Serikat Cs menghadapi Uni Soviet Cs. Dalam konteks ini,

penghancuran PKI sejalan dengan strategi Amerika sehingga pers Barat menganggap itu sesuatu yang melanggar hukum akan tetapi bisa diterima, dan mereka tidak membesar-besarkannya. Karena itu, kasus '65 ini secara internasional kurang populer atau kurang mendapat sorotan pers dunia. Itu yang pertama.

*Kedua*, di dalam negeri sendiri, peristiwa '65 memang sengaja ditutup-tutupi. Padahal, tragedi ini sendiri sampai sekarang masih menyisakan banyak dampak. Anehnya, hampir tidak ada atau sangat sedikit buku yang membahas masalah ini. Jadi, menurut saya, tragedi '65 adalah masalah yang memang sengaja ditutup-tutupi.

Selanjutnya, peristiwa '65 merupakan peristiwa yang sudah lama terjadi, namun proses atau dampaknya masih berkepanjangan sampai sekarang. Dengan kata lain, tragedi '65 merupakan suatu peristiwa yang prosesnya masih berjalan dari tahun '65 sampai 30-an tahun kemudian. Kita tahu bahwa dampaknya masih terasa. Buktinya dalam kasus pencabutan tap MPRS No XXV tentang Komunisme,

Marxisme, dan Leninisme masih ada hambatan. Hali ini tidak lain karena dampak dari peristiwa itu memang masih berpengaruh sampai sekarang.

*Mengapa sejarah atas tragedi '65 ditutup-tutupi? Apa kepentingan pemerintah untuk menutup-nutupi itu?*

Karena ini tidak sesuai dengan skenario pemerintah yang mengatakan bahwa pemberontakan 30 September merupakan gerakan yang dilancarkan oleh PKI. PKI adalah dalang dari peristiwa itu. Dan, sebagai konsekuensinya, PKI dicap sebagai suatu kelompok yang akan menghancurkan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kalau PKI dikatakan berontak, dan mereka dalangnya, orang dengan mudah mengatakan bahwa masalahnya sudah selesai. Artinya ada sebuah kelompok yang melakukan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibayar misalnya dengan tewasnya setengah juta orang. Nah, sejarah yang sebenarnya mengenai PKI itu sengaja ditutupi supaya penghancuran PKI sampai ke akar-akarnya masih bisa dipertahankan dengan berbagai tujuan. Misalnya, kepentingan untuk tidak memungkinkan kembalinya ideologi atau ajaran komunisme dan marxisme. Selain itu, bisa juga untuk menghancurkan orang-orang yang mengkritik pemerintah. Pemerintah akan mudah mencap kelompok-kelompok kritis sebagai kelompok PKI.

*Karena sifatnya ditutupi, secara historis, berarti ada sesuatu yang belum terungkap.*

*Adakah data baru yang sudah ditemukan berkaitan dengan tragedi ini?*

Dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun, data baru selalu bertambah. Misalnya, data mengenai keterlibatan CIA. Kita semakin yakin dengan dibukanya dokumen atau arsip yang ada di Amerika misalnya arsip Departemen Luar Negeri Amerika. Keterlibatan Amerika atau khususnya CIA makin jelas. Kita akan tunggu lagi data berikutnya karena meskipun sudah dibuka, dari data tersebut kita tahu bahwa sebelumnya masih ada hal-hal yang dihitamkan di dalam arsip tersebut. Jadi kita masih menunggu data yang akan dibuka lebih lanjut. Di dalam negeri sendiri sudah agak banyak memoar dan buku yang ditulis oleh para korban tragedi '65, termasuk yang menjadi korban penahanan di Pulau Buru. Menurut saya, itu menjadi hal baru yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh masyarakat.

Bisakah kita memilah-milah pihak mana sebagai korban dan pihak mana sebagai pelaku dalam konteks tragedi '65. Ini penting karena kadangkala persoalan tentang siapa korban dan siapa pelaku tersebut menjadi tumpang tindih.

Dalam kasus ini, kita harus bedakan dua hal berikut, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Operasi penumpasan PKI yang dilakukan tentara di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, itu merupakan kegiatan yang sifatnya dilakukan oleh negara, dan karena itu, berdimensi vertikal. Dalam hal ini, pelakunya adalah

aparatus negara. Sementara yang menjadi korban adalah orang-orang yang terbunuh pada waktu tahun 1965 dan awal tahun 1966. Tetapi kita juga bisa mengatakan, misalnya, orang-orang yang berada di lapangan seperti Banser-NU pada saat itu, sebenarnya adalah pihak yang dimanfaatkan oleh tentara untuk menghancurkan sisa-sisa PKI. Mengenai Banser-NU ini, saya bisa mengatakan bahwa tahun 1965 Banser-NU bisa dikatakan sebagai kategori pelaku. Namun, justru pada tahun 1971, Banser kembali menjadi korban karena ketika menghadapi pemilu tahun 1971, pemerintah Soeharto menganggap Banser-NU ini termasuk kelompok yang menghalangi keinginan mereka. Tak pelak lagi, Banser-NU akhirnya menjadi korban. Jadi, dalam kasus ini, selain Banser-NU sebagai pelaku juga sebagai korban pada peristiwa yang lain.

*Jadi maksud Anda kesimpangsiuran tragedi '65 itu selalu saja terjadi? Dengan kata lain hal itu tergantung intepretasi sejarah yang digunakan? Pertanyaan pokoknya, menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara kita memandang tragedi tersebut? Adakah historiografi atau teori sosial yang bisa menjelaskan itu dengan baik, paling tidak mampu menempatkan tragedi itu dalam sejarahnya secara proporsional?*

Pertama, saya ingin mengatakan, mengenai jumlah korban memang diperdebatkan. Komisi yang ditugaskan oleh Presiden waktu itu mengatakan korban sebanyak 78 ribu, ada juga yang kemudian mengatakan 780 ribu. Sedangkan anggota

yang lain, Sarwo Edi, mengatakan 3 juta korban. Kalau saya ambil tengah-tengahnya, berarti ada setengah juta manusia yang menjadi korban pada waktu itu. Kemudian, mengenai kesimpangsiuran siapa pelaku dan korban, menurut saya tidak terlalu signifikan dibanding dengan aspek yang lain, seperti soal trauma. Siapa yang paling menderita dari peristiwa tersebut, tak lain adalah orang-orang yang terlibat Gerakan 30 September baik secara langsung maupun tidak. Termasuk di dalamnya, anggota keluarga mereka merupakan kelompok yang sangat menderita dengan ketentuan pemerintah yang diskriminatif. Misalnya, mereka tidak bisa bekerja sebagai pegawai negeri, militer, polisi, guru, dll. Itu semua merupakan akibat dari peristiwa ini. Sebetulnya, menurut saya, di kalangan Nahdlatul Ulama yang dulunya Banser-NU ikut secara langsung maupun tidak dalam tragedi '65 sudah mulai muncul rasa bersalah. Meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, paling tidak di kalangan anak-anak mereka sudah tumbuh kesadaran lain. Menurut saya, itu harus



diselesaikan. Artinya, peristiwa tersebut harus dijelaskan sesuai duduk perkaranya. Kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi, saling memaafkan. Itu semua, menurut saya, merupakan jalan yang paling baik *ketimbang* hanya mendiamkan atau melupakannya padahal persoalannya menimbulkan dampak sosial psikologis yang sangat besar bagi sekelompok masyarakat yang mungkin sekarang jumlahnya jutaan jiwa.

*Apakah trauma sejarah yang berkepanjangan seperti itu bisa diselesaikan dengan meluruskan sejarah, dan bagaimana caranya?*

Meluruskan sejarah hanya merupakan salah satu cara. Masih banyak aspek lain yang perlu dilakukan, misalnya rekonsiliasi. Saya memberi apresiasi mendalam terhadap apa yang dilakukan teman-teman SYARIKAT di Yogyakarta yang melakukan rekonsiliasi sampai pada kelompok akar rumput. Jadi, harus ada pula usaha-usaha yang praktis di lapangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang dulu pernah bertikai. Itu adalah salah satu cara yang bisa diambil. Hal yang lain, misalnya dengan adanya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pemberian rehabilitasi bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak dengan Gerakan 30 September, dan lain-lain. Itu adalah tindakan dari berbagai cara yang bisa diambil dan tidak terpaku pada satu cara saja. Intinya untuk rekonsiliasi ini, kita bisa melakukan pendekatan formal, dari pemerintah melalui KKR, tetapi juga melalui jalur non-formal, seperti rekonsiliasi pada tingkat akar

rumput.

*Kedua*, kalau diadakan KKR, maka harus diadakan penyelidikan untuk mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya. Kemudian baru diadakan rekonsiliasi. Namun, menurut saya tidak harus begitu prosesnya. Bisa saja urutannya dibalik. Jadi rekonsiliasinya sudah dimulai, namun pengungkapan kebenarannya juga dijalankan walaupun lebih kemudian. Demikian juga rehabilitasi yang merupakan salah satu aspek dari KKR juga bisa dilakukan lebih awal. Jadi kita mempunyai berbagai cara untuk itu.

Apakah rekonsiliasi mungkin dilakukan dalam konteks sosial politik seperti sekarang? Jangankan rekonsiliasi, permintaan maaf saja mendapatkan tantangan yang sangat besar dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam tragedi ini.

Saya kira memang ada kelompok yang ingin supaya masalah ini tidak diungkap dan tidak diselesaikan. Itu sangat jelas kelihatan, yaitu sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang ingin tampil ke panggung politik. Mereka tidak mau pengungkapan ini terjadi karena menyangkut kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa lalu. Akan tetapi, kelompok masyarakat termasuk juga LSM, semestinya terus berupaya untuk melakukan dengan satu dan lain cara menyelesaikan persolan-persoalan masa lalu. Kalau tidak, kita akan terbebani dengan aspek-aspek pelanggaran HAM ini yang mempunyai dan memberikan dampak atau stigma yang sangat buruk terhadap kelompok masyarakat tertentu.

*Sebenarnya, apa inti dari rekonsiliasi? Dan apakah perlu suatu peradilan khusus untuk itu?*

Inti dari rekonsiliasi adalah terungkapnya kebenaran-kebenaran. Caranya, bisa melalui pengadilan HAM atau yang lain, bisa melalui pengakuan-pengakuan seperti yang dilakukan oleh komisi kebenaran di luar negeri. Tapi juga bisa penulisan buku-buku tentang peristiwa tersebut. Rekonsiliasi pada hakikatnya adalah seseorang rujuk kembali. Tetapi setelah tahu ada pihak yang bersalah, kemudian ada pihak yang minta maaf bisa secara ekspilisit atau tidak. Bisa juga dengan sikap tertentu yang sudah memperlihatkan cermin permintaan maaf itu. Intinya, dalam rekonsiliasi kebenaran harus diungkapkan.

*Tentu dengan tidak melupakan aspek peradilan hukum?*

Ya. Tidak cukup hanya dengan KKR. Para pelaku harus diadili terlebih dahulu. Tentu saja mereka adalah pelaku-pelaku yang cukup bukti untuk diadili. Perlu diingat, tidak semua dari proses pelanggaran HAM dari tahun 1965 sampai sekarang terdapat cukup bukti kuat. Untuk itu, dari sekarang, harus diselesaikan melalui KKR. Tapi yang sudah cukup bukti bisa melalui pengadilan HAM.

*Adakah pengalaman negara lain dalam hal penyelesaian konflik rekonsiliasi bisa diterapkan di Indonesia?*

Ada, seperti pengalaman di Afrika Selatan. Tetapi yang jelas pengalaman itu sifatnya beragam. Permasalahannya juga tidak sama. Kalau di Afrika Selatan permasalahannya lebih jelas, yaitu antara kulit hitam dan kulit putih. Sedangkan di Indonesia, permasalahannya lebih ruwet dan kompleks, tidak hanya aparat negara dan masyarakat akan tetapi ada juga konflik yang bersifat horizontal, antar-komunitas yang ada di masyarakat. Jadi penyelesaiannya mungkin tidak semudah di Afrika Selatan. Tetapi, bukan berarti pengalaman di Afrika Selatan tidak bisa dilakukan.

*Apakah pemerintah dan DPR telah melakukan upaya-upaya konkret dalam mewujudkan rekonsiliasi?*

Tidak ada jalan lain, pemerintah harus terus-menerus didorong. Buktinya, rancangan undang-undang KKR telah mengendap satu tahun lebih, entah di Menteri Kehakiman dan HAM, atau di Sekretariat Negara. Tapi, berkat desakan masyarakat, RUU itu akhirnya sudah diserahkan ke DPR. Maka, mestinya sekarang kita tinggal mendorong DPR.

Di pihak lain, seperti Mahkamah Agung, sudah mulai bereaksi mengenai tragedi '65 ini dengan cara mengeluarkan surat kepada presiden untuk dapat memberikan rehabilitasi. Yang penting sekarang, bagaimana masyarakat sendiri turut mendorong pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung untuk memperhatikan hal ini.

*Sekarang ini, anggota DPR yang memiliki komitmen terhadap rekonsiliasi bisa dikatakan sangat sedikit. Apakah Anda optimis?*

Yang jelas, undang-undang KKR telah diserahkan DPR, dan mereka tidak mungkin akan menolak undang-undang itu. Persoalannya, sejauh mana undang-undang tersebut mengalami perubahan. Ini adalah ajang perjuangan kelompok-kelompok pro-reformasi di DPR dengan mereka yang pro-*status quo*. Sampai sejauh mana RUU yang sudah dibuat itu mengalami perubahan, di sinilah kita bisa menilai dari hasil undang-undang KKR yang dibuat itu.

*Perjuangan melalui jalur politik kelihatannya lebih susah ketimbang jalur kultural?*

Saya kira, keduanya harus dilakukan secara sekaligus. Saya menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh sekelompok anak muda Nahdlatul Ulama dalam wadah SYARIKAT di Yogyakarta yang telah memulai gerakan rekonsiliasi dari tingkat bawah dengan melihat aspek kultural dan pendekatan budaya. Saya kira, ini sangat penting. Namun, tidak berarti bahwa usaha formal yang dilakukan dengan pembentukan KKR menjadi tidak penting. Tetap penting. Menurut saya keduanya harus dijalankan sekaligus dan serempak.

*Sejauh ini, bagaimana dengan upaya Komnas HAM sendiri?*

Komnas HAM selalu mendorong pembuatan undang-undang KKR. Bahkan, di setiap kesempatan, baik pengurus maupun ketua Komnas HAM selalu menghimbau agar undang-undang ini diajukan. Dan kenyataannya, memang telah diajukan Sekretariat Negara kepada DPR. Selain itu, Komnas HAM juga sudah membentuk tim untuk mensosialisasikan undang-undang KKR ini, di samping melakukan *lobby* ke DPR dan pihak-pihak lain. Menurut saya, langkah-langkah tersebut cukup positif.

*Seiring dengan proses demokratisasi yang berjalan sekarang, apakah rekonsiliasi bisa dipercepat?*

Proses untuk mempercepat rekonsiliasi adalah dengan adanya dorongan dari masyarakat, kalangan LSM, dan lain-lain. Bahkan, kalau ada yang mau, partai politik sendiri bisa menggunakan isu rekonsiliasi untuk kampanye mereka di tahun 2004.

*Apakah isu rekonsiliasi cukup strategis untuk dikampanyekan partai politik? Bukankah kondisi masyarakat kita masih antipati terhadap komunisme?*

Tidak juga. Buktinya, PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi di DPR yang menginginkan Tap MPRS No. XXV tahun 1966 dicabut. Mereka menganggap orang-orang yang terlibat PKI termasuk anggota keluarganya mengandung potensi yang cukup besar untuk perolehan suara di Pemilu 2004. ❖